Vol. 2, No. 2, Agustus 2024 *(102-110) E-ISSN: 3025-0099*
DOI: https://doi.org/10.64405/jm.v2i2.93

Jurnal Miftahul Ulum
Pendidikan dan Ekonomi
Email : jnmu.staimu@gmail.com / **Publisher : IAI Miftahul Ulum**
https://journal.iaimutanjungpinang.ac.id/junamu

Peran Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam Peningkatan Pengendalian Internal Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis dalam Perspektif Syariah

Dariana
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis, Riau, Indonesia
e-mail: dariana.bengkalis72@gmail.com

Ema Nirwana
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis, Riau, Indonesia
e-mail: halbysharkan@gmail.com

Dewi Oktayani
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis, Riau, Indonesia
e-mail: dewioktayani87@gmail.com

Aldina Natasya
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis, Riau, Indonesia
e-mail: aldina88@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada DPMPTSP serta mengetahui peran Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam pengendalian internal di DPMPTSP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dimana pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Responden wawancara adalah Kepala DPMPTSP dan BPKAD, Sekretaris DPMPTSP dan BPKAD, dan bagian keuangan DPMPTSP dan BPKAD. Hasil analisa menunjukkan bahwa SIKD dan SPI pada DPMPTSP telah sesuai dengan peraturan pemerintah. Kemudian Peran SIKD dalam SPIP adalah mempermudah dalam pengelolaan keuangan daerah berdasarkan aplikasi atau sistem sehingga pencatatan keuangan lebih efektif dan efisien. Serta mampu mengurangi kecurangan atas laporan keuangan.
Kata Kunci: *Sistem Informasi Keuangan Daerah; Sistem Pengendalian Internal.*

Abstract

This study aims to determine the application of regional financial information systems and internal control systems in DPMPTSP and to determine the role of regional financial information systems in internal control in DPMPTSP. This study uses a descriptive qualitative research method where data collection uses interviews and documentation techniques. Interview respondents were the Head of DPMPTSP and BPKAD, the Secretary of DPMPTSP and BPKAD, and the finance department of DPMPTSP and BPKAD. The results of the analysis show that the regional financial information system

and internal control system comply with government regulations. Then the role of SIKD in SPIP is to facilitate regional financial management based on applications or systems so that financial records are more effective and efficient. As well as being able to reduce fraud on financial reports.
Keywords: *Regional Financial Information System; Internal Control System*

PENDAHULUAN

Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) menyebutkan bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasi-kan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggung jawaban pemerintah daerah. Sedangkan Informasi Keuangan Daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, 2005).

Sistem Informasi Keuangan Daerah SIKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Aplikasi ini juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam dan pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan. (Https://Keuda.Kemendagri.Go.Id/Sipkd Diakses Tanggal 25 Februari 2024).

Salah satu contoh fenomena mengenai lemahnya sistem pengendalian internal adalah sebagai berikut: Dalam IHPS (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester) I tahun 2013 terdapat 21 obyek pemeriksaan terkait BUMN dengan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) yang meliputi pelaksanaan, subsidi, kewajiban pelayanan umum (KPU), operasional BUMN, dan pengelolaan pendapatan, biaya, investasi, dana program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL), terdapat 150 kasus penyimpangan, 234 kasus, terkait kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan 276 kasus terkait ketidak patuhan terhadap ketentuan perundang- undangan. Dari 510 kasus yang ada, sebanyak 93 kasus merupakan kasus-kasus yang mengakibatkan kekurangan penerimaan di BUMN senilai Rp 2,60 triliun. Selain itu, terdapat 28 kasus ketidakefektifan senilai Rp 44,75 triliun di beberapa BUMN karena tidak tepat sasaran. Jumlah kasus kelemahan SPI sebanyak 5747,sebanyak 2.854 kasus merupakan

penyimpangan administrasi dan sebanyak 779 kasus dengan nilai Rp 46,24 triliun merupakan temuan ketidakhematan, dan ketidakefektifan.

Sementara itu, sebanyak 4.589 kasus senilai Rp 10,74 triliun merupakan ketidakpatuhan, sehingga dampaknya mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan. Atas temuan tersebut, BPK memberikan rekomendasi berupa penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/ pemerintah daerah atau perusahaan negara. Dari seluruh temuan BPK tersebut sekitar Rp 372,40 miliar telah disetorkan kembali ke kas negara atas rekomendasi BPK di atas. (Https://Aktual.Com/ Pt.Caprof Media Negeri (Cmn) Diakses Pada Tanggal 25 Februari 2024).

Menurut Agustina Wulandari dalam penelitianya tentang urgensitas sistem informasi pengelolan keuangan daerah atau SIKD adalah bahwa pelaksanaan SIKD pada Pemerintah Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri sudah berjalan dengan baik. Tetapi terdapat beberapa hal yang masih harus diperbaiki. Sebaiknya pengelola server pusat perlu menambah kapasitas bandwidth server sehingga saat dipakai bersamaan seluruh OPD aplikasi tetap berjalan lancar dan perlu dilakukan penyempurnaan sistem operasi aplikasi SIKD (Agustina Wulandari, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Ali Nasrun tentang Urgensi Integrasi Sistem Informasi Akuntansi Instansi Pemerintah, dengan hasil penelitianya, Laporan keuangan mempunyai peran penting untuk mengukur kinerja pemerintah, apakah terkendali sesuai landasan dan mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam APBN, serta menjadi pendukung pengambilan keputusan. Diantara kualitas laporan keuangan yang harus dicapai adalah lengkap dan tepat waktu. Sistem informasi akuntansi yang berjalan pada pemerintah Republik Indonesia saat ini bersifat desentralisasi atau menyebar ke seluruh instansi dalam platform desktop application. Kondisi ini tentu menimbulkan kendala-kendala dalam mencapai kualitas laporan keuangan yang lengkap dan tepat waktu. Jumlah instansi penyelenggara akuntansi yang ribuan banyaknya dan tersebarnya lokasi geografis dengan dukungan fasilitas komunikasi yang tidak semuanya baik, telah cukup untuk menggambarkan kesulitan yang dihadapi (Ali Nasrun, 2012).

Perbedaan penelitian dengan peneliti sebelumnya berbicara tentang laporan keuangan namun disini peneliti lebih menekankan kepada pengendalian internal dalam penialian resiko yang ada ditempat penelitian. Namun juga peneliti sama-sama meneliti tentang urgensitas SIKD namun variabel pendukungnya berbeda dengan peneliti sebelumnya. Inilah yang membuat peneltian ini layak untuk diteliti kembali di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, khususnya DPMDPTSP.

Penelitian ini merupakan pegembangan dari penelitian tentang Urgensitas Sistem Informasi Keuangan Daerah. Persamaannya dalam penelitian ini adalah sama sama meneliti tentang tentang Urgensitas Sistem Informasi Keuangan Daerah, namun perbedaanya adalah tentang variabel pendukung yang

diteliti dan memiliki perbedaan tempat penelitian dan kriteria dari subjek yang diteliti.

Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan salah satu bentuk penerapan E-Government dalam rangka mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan pengelolaan keuangan yang bersih, efektif dan efisien sesuai konsep value for money. Pemerintah Daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menerapkan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah sejak tahun 2021. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan pengelolaan keuangan yang transparan, efektif dan efisien disamping laporan pertangungjawaban keuangan yang akuntabel dan auditabel. Begitu juga dengan penerapan pengendalian internal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sangatlah penting. Hal ini merupakan tanggung jawab yang melekat pada Kepala Perangkat Daerah. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah harus didukung dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) agar penyelenggaraan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif sehingga dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan secara handal, mengamankan aset, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Belum maksimalnya pelaksanaan SPIP juga dapat dilihat masih adanya Perangkat Daerah yang melakukan penyimpangan, baik administrasi maupun keuangan. Selain itu juga masih adanya Perangkat Daerah yang belum menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan. Hal ini yang menjadi landasan penelitian untuk tertarik mengambil judul penelitian ini.

Berdasarkan fanomena dan fakta literatur, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang "Peran Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Dalam Peningkatan Pengendalian Internal Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis Dalam Perspektif Syariah"

Akuntansi Keuangan Daerah merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (Abdul Halim, 2008). Pihak-pihak eksternal entitas yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan pengawasan keuangan, investor, kreditur, donatur, rakyat dan pemerintah pusat yang seluruhnya berada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah.

Sistem Informasi Keuangan Daerah SIKD adalah aplikasi terpadu

yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Aplikasi ini juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam penginterpretasian, pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan (Https://Keuda.Kemendagri.Go.Id/Sipkd diakses Tanggal 25 Februari 2024).

Bagi pemerintah daerah yang telah ditetapkan sebagai daerah berbasis implementasi (DBI) atau berminat mengimplementasikan aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (SIKD) akan diberikan pelatihan intensif mengenai cara menggunakan, baik secara penggunaan maupun pemeliharaan. Dan bagi pemerintah daerah yang telah menggunakan aplikasi lain selain aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), akan dibantu untuk melakukan semua tahapan terkait dengan proses migrasi tersebut.

Terkait dengan tugas untuk menegakkan akuntabilitas keuangan, khususnya didaerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingannya. Pentingnya mempublikasikan laporan keuangan yaitu : (Mahmud,2016).

Dari sisi internal, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan, maupun unit-unit kerja di dalamnya (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban internal (internal accountability), yaitu bentuk pertanggungjawaban kepada satuan kerja kepada kepala daerah, kepala daerah kepala pegawai pemerintahan daerah dan DPRD.

Dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban eksternal (external accountability), yaitu pertanggungjawaban kepada daerah, kepada masyarakat, investor, kreditor, lembaga donor, pers, serta pihak- pihak yang lain yang berkepentingan dengan laporan tersebut.

Akuntansi Keuangan daerah mempunyai beberapa tujuan yaitu: (Nordiawan, Deddi Dan Ayuningtyas Hertianti, 2010).

Tujuan Pertanggungjawaban

Tujuan pertanggungjawaban, dalam tujuan pertanggung jawaban pemerintah harus memberikan informasi keuangan secara lengkap, memberikan informasi keuangan secara cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat.

Tujuan manajerial

Tujuan manajerial, dalam tujuan menajerial, memberikan informasi keuangan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja

pemerintah adalah tujuan yang diharapkan dapat dicapai dengan adanya akuntansi pemerintah.

Tujuan Pengawasan

Tujuan pengawasan, memiliki arti bahwa informasi yang dihasilkan akuntansi pemerintah harus memungkinkan untuk terselenggarakan pemeriksaan oleh aparat pengawasan. SIKD juga sangat berhubungan dengan pengendalian internal. Pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan (Romney, M. B., & Steinbart, P. J. . 2014). Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang digabungkan untuk melindungi aset organisasi, memeriksa ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi. 2016).

Komponen pengendalian internal Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah dilaksanakan sejak pemberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Untuk dapat mengetahui keberhasilan penyelenggaraan SPIP, diperlukan indikator efektivitas penyelenggaraan SPIP. Sebuah kajian yang dilakukan oleh Puslitbangwas BPKP telah merumuskan indikator pencapaian tujuan SPIP dengan menetapkan keempat tujuan SPIP sebagai outcome penerapan SPIP, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Kajian Nomor LHT- 947/LB/2009 tanggal 21 Desember 2009.

METODE PENELITIAN

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data skunder. Data dalam penelitian ini adalah Sistem Pengendalian Intenal dan pengawasan terhadap pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkalis. Analisis data dalam penelitian ini diawali dengan reduksi data, penyajian data serta verifikasi dan kesimpulan. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti (Ahmad Rijali . 2018).

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Kemudian penarikan simpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis

data. Kesimpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan dan dari hasil penelitian bahwa Peran Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam Peningkatan Pengendalian Internal Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis Dalam Perspektif Syariah sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang telah berlaku. dan juga bisa diambil kesimpulan bahwa sistem yang dijalankan sesuai dengan SOP dan peraturan perundang-undangan pemerintah.

Hal ini juga didukung dengan penelitian yang diakukan oleh Darmiati (2010) Tentang Peran Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam Peningkatan Pengendalian Internal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai menyatakan Temuan penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya *technology acceptance* model yang diterapkan pada pemerintah daerah kabupaten sinjai dinilai dapat meningkatkan kinerja pemerintah. Hal ini membuktikan bahwa proses penerimaan SIKD sepenuhnya dapat dijelaskan oleh technology acceptance model /TAM (Darmiati, 2010).

Dengan demikian Sistem pengendalian intern yang dijalankan dilingkungan pada SKPD Kabupaten Bengkalis sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP, dimana segala macam upaya telah dilakukan SKPD Kabupaten Bengkalis, yakni dengan memberikan binaan dan pamantauan terhadap karyawan dan menerbitkan berbagai aturan yang memberi dampak baik terhadap sistem kendali di lingkungan instansi dan mengurangi tingkat penyelewengan terhadap tujuan dinas.

SPIP memberikan manfaat bagi SKPD Kabupaten Bengkalis, memberikan jaminan yang memadai bahwasanya efisiensi dan efektivitas dicapai dalam mencapai tujuan administrasi publik, reliabelnya sebuah laporan keuangan, perlindungan harta publik serta loyalitas kepada aturan negara yang berlaku. Yang mana telah berlaku umum, SPIP sudah menjadi suatu ketentuan perundang- undangan dalam bentuk PP yang maknanya sudah diharuskan sebagai harapan pemerintah dalam menuntaskan pelaksanaan regulasi restorasi bagian keuangan. Dengan demikian evaluasi kepada keadaan SPIP sebuah organisasi pemerintahan, berikutnya dapat dijadikan sebagai dasar penilaian, implementasi SPIP pada organisasi pemerintahan merupakan suatu progres yang dilanjutkan dengan implementasi SPIP, dimulai dari tingkat knowledge sampai dengan implementasinya (Andika Restu Adhitya, 2020).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dela Dwitanti tentang Evaluasi Efektivitas Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka dan berdasarkan hasil penelitianya yaitu sistem informasi keuangan daerah pada dinas pendapatan,

pengelolaan keuangan dan aset daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka berdasarkan persepsi pengguna adalah efektif karena menerapkan Peraturan Bupati Kabupaten Bangka No 10 Tahun 2008 tentang pengelolaan keuangan daerah, berdasarkan evaluasi peneliti di tempat penelitian penggunaan sistem SIKD di dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah bagian perencanaan dan pelaporan adalah efektif, sedangkan di bagian umum dan kepegawaian masih diharapkan lebih meningkatkan pada aspek kecepatan dan ketepatan waktu karena berdasarkan perhitungan indikator efektivitas, aspek tersebut berada pada kriteria kurang efektif (Dwitanti, 2016).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya maka dapat diperoleh kesimpulan mengenai peran Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dalam peningkatan Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis Dalam Perspektif Syariah sebagai berikut :

1. Sistem Infromasi Keuangan Daerah (SIKD) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis sudah menerapkan aplikasi keuangan ini sejak tahun 2021. Dan ini sudah digunakan selain mempermudah pengelolaan keuangan juga dalam pencatatan pemasukan, pengeluaran anggaran di DPMPTSP Kabupaten Bengkalis;
2. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur dan peraturan pemerintah, untuk itu tetap harus mempertahankan suatu pengawasan dana pemantauan dalam pengelolaan keuangan;
3. Peran SIKD dalam Peningkatan Pengendalian Internal secara syariah belum diterapkan pada DPMPTSP Kabupaten Bengkalis, hal ini disebabkan karena sistem yeng digunakan bukan sistem syariah namun masih menerapkan sistem dan aplikasi berbasis aktual.

REFERENSI

Halim, Abdul. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3*, (Jakarta : Salemba Empat. 2008.

Hasibuan. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan Ketujuh Belas. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2013.

Mahmudi. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta : UPP STIM YKPN. 2016.

Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart. *Accounting Information System (Sistem Informasi Akuntansi)*, terj.Deny Arnos Kwary dan Dewi Fitriasari, Jakarta: Salemba Empat. 2003.

Mulyadi. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat. 2016.

Mahfiz, Nada Khairun, Hetika, Ghea Dwi Rahmadeane, Analisis Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Kecamatan Jatibarang. *Skripsi*, Tegal: Politeknik Harapan Bersama.

2019.

Nasrun, Ali. Urgensi Integrasi Sistem Informasi Akuntansi Instansi Pemerintah. *Jurnal Teknis ITS*. Vol 1, No 1. 2012.

Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. *Akuntansi Sektor Publik. Edisi Kedua*. Jakarta:Salemba Empat. 2010.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Purnama Sari, Ratna. Pentingnya Pengendalian Internal Untuk Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *JRAMB, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMB Yogyakarta* .Volume 6 No. 1., Mei, 2020.

Rijali, Ahmad. Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah* Vol. 17 No. 33. 2018.

Rahman Modim, Arif. Jurnal Evaluasi Pengendalian Intern Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Atas Penjualan Jasa Kamar Pada Big Fish Hotel. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(4), 2018, 776-785. 2019.

Susanto, Azhar. *Sistem Informasi Akuntansi, Struktur-Pengendalian Resiko-Pengembangan*, Edisi Perdana, Lingga Jaya, Bandung. 2013.

Turner, Leslie, Andrea Weickgenannt, dan Mary Kay Copeland. *Accounting Information Systems*: Controls and Processes. 2017.

Wulandari, Agustina. Evaluasi Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Sipkd) Untuk Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Pada Kecamatan Pracimantor Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*. Vol 12 No 2. 2022

https://djpk.kemenkeu.go.id Tentang Akunansi Keuangan Daerah. Diakses Tanggal 14 Februari 2024.

https://aktual.com/ Diakses pada tanggal 25 Februari 2024

https://www.bpkp.go.id/ Diakses Pada Tanggal 25 Februari 2024